

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2016, rasio efektifitas PADnya sebesar 111,80% dan di kategorikan sangat efektif, di tahun 2017 rasio efektifitas PADnya sebesar 95,53%, dikategorikan kurang efektif, dan pada tahun 2018 rasio efektifitas PADnya sebesar 80,89%, dikategorikan kurang efektif.
2. Hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2016, rasio ketergantungannya sebesar 78,65%, dikategorikan sangat tinggi. Pada tahun 2017, rasio ketergantungannya sebesar 77,93%, dikategorikan sangat tinggi. Pada tahun 2018, rasio ketergantungannya sebesar 77,56%. dikategorikan sangat tinggi.
3. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, rasio kemandiriannya sebesar 7,68%, dan pola hubungannya instruktif. Pada tahun 2017, rasio kemandiriannya sebesar 9,72%, dan pola hubungannya instruktif. Pada tahun 2018, rasio kemandiriannya sebesar 7,00% dan pola hubungannya instruktif.
4. Hasil perhitungan derajat desentralisasi dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, rasio derajat desentralisasi sebesar 6,04%.

Pada tahun 2017, sebesar 7,57%. Pada tahun 2018, sebesar 5,43%. Secara umum berdasarkan nilai tingkat kemampuan yang ada 0-25 dikategorikan sangat kurang. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Ngada harus terus mengoptimalkan pengelolaan PAD agar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif stabil dan terus meningkat, sehingga semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi..

5. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan yang signifikan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Ngada. Pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 12,9%. Pada tahun 2017 sebesar 4,63%. Pada tahun 2018 sebesar -7,45%.
6. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja dapat dilihat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 total realisasi sebesar 91,39% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 total realisasi sebesar 93,87% dan 90,01% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD.

6.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada, yakni antara lain:

1. Kabupaten Ngada perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kabupaten Ngada. Efisiensi akan meningkat jika Pemerintah Kabupaten Ngada dapat melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi kecil dalam PAD.
2. Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam Pemerintahan Kabupaten Ngada, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Ngada perlu menggali lebih lagi potensi dari masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan sumber dana untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
3. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu Kabupaten yaitu Kabupaten Ngada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Anonimous. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah.
- Anonimous. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Anonimous. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Anonimous. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Anonimous. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2018.
- Anonimous. Kepmendagri No. 690. 900. 372 tahun 1996 tentang Kriteria untuk Mengukur Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Assidiqi, Bahrun. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Imam & Mugroho, Tri Laksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Risky Pramita, Puput, 2015. *Analisis Rasio Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Daerah: Studi Kasus Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.